

**KONFRONTASI INDONESIA – MALAYSIA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA
(1963-1966)**

Heru Sutrisno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Email : biebie_cayang_miemie@yahoo.com

Nasution

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Presiden Soekarno yang pada saat itu menerapkan politik konfrontatif sebagai wujud dari sikap anti *nekolim*, mengakibatkan Indonesia masuk dalam permasalahan dengan Malaysia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : apa latar belakang Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia, dan bagaimana dampak konfrontasi dengan Malaysia terhadap ekonomi Indonesia 1963-1966. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan tahap yang terakhir adalah historiografi.

Pada tahap heuristik dapat dikumpulkan beberapa sumber antara lain : Lembaran Negara Republik Indonesia No.30, No.32, No.89, No.238, pidato Presiden Soekarno pada pembukaan ganefo di Jakarta, Surat Komando Aksi Sukarelawan. Kemudian dari sumber koran atau majalah anatara lain : Sketsmasa No.14.Th.VI.1963, No.15.Th.VI.1963, No.21.Th.VI.1963, No.24.Th.VII.1964, No.9.Th.VII.1965, No.9.Th.VIII.1965, No.13.Th.VIII.1965, No.13.Th.VIII.1965. Setelah itu, penulis melakukan kritik dengan cara membandingkan sumber-sumber yang telah diperoleh baik itu koran, majalah atau buku tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tahun 1963-1966. Kemudian pada tahap Interpretasi (penafsiran), disimpulkan dan ditafsirkan fakta-fakta yang diperoleh untuk diinterpretasikan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Tahapan terakhir adalah historiografi, peneliti berusaha merangkai fakta sejarah yang sudah diklasifikasikan secara kronologis menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya sesuai dengan ketentuan metode penelitian sejarah.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, permasalahan dengan Malaysia berawal dari gagasan PM Malaya Tengku Abdulrachman yang ingin membentuk Federasi Malaysia. Indonesia telah terbawa wacana suasana perang dingin, yang membagi dunia ini menjadi dua blok yakni antara Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia memelopori gerakan non blok dan anti terhadap terbentuknya kolonialisme baru. Presiden Soekarno yang menjalankan politik anti *nekolim* yang sudah menganggap bahwa Malaysia adalah wujud dari aksi Inggris dalam membentuk *nekolim*, dan pembentukan federasi Malaysia dianggap oleh Presiden Soekarno telah mengancam wilayah Indonesia. Dengan adanya konfrontasi ini berdampak pada pengambilan kebijakan ekonomi Indonesia, yang semua kebijakan ekonomi pemerintah dititik beratkan pada pemikiran politik dan mengiraukan kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku sehingga juga berdampak kepada keadaan ekonomi Indonesia

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, ditinjau dari permasalahan ekonomi yang di hadapi Indonesia mengakibatkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sering mengalami kekeliruan, contohnya usaha membendung peredaran uang dikelurkan kebijakan nilai uang kertas pecahan Rp.500,- dan Rp.1000,- diturunkan masing-masing menjadi Rp.50,- dan Rp.100,-. Namun akibatnya, harga barang-barang dalam rupiah baru menjadi seperseribu harga dalam rupiah lama, sehingga mengakibatkan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sehingga berdampak semakin memburuknya keadaan ekonomi Indonesia.

Kata kunci: Konfrontasi, Malaysia, Ekonomi,

Abstract

At the time of guided democracy, Indonesia is faced with a very difficult situation. President Sukarno, who at that time apply the confrontational politics as a form of anti Nocolim, lead Indonesia into the problem with Malaysia. The problem in this study is: what is the background of Indonesian confrontation with Malaysia, and how the impact of

confrontation with Malaysia to the Indonesian economy from 1963 to 1966. In this study the authors used the method of writing history that includes heuristics, criticism, interpretation, and the last stage is historiography. At this stage of the heuristic can be collected several sources, among others: Republic of Indonesia No.30, No.32, No.89, No.238, President Sukarno's speech at the opening Ganefo in Jakarta, Volunteer Action Letter command. Then from the source newspaper or magazine among other things: Sketsmasa No.14.Th.VI.1963, No.15.Th.VI.1963, No.21.Th.VI.1963, No.24.Th.VII.1964, 9 . Th.VII, 1965, No. 9.Th.VIII, 1965, 13. Th. VIII.1965, No.13.Th.VIII.1965. After that, the author critiques by comparing the sources that have been obtained either newspapers, magazines or books on Indonesian confrontation with Malaysia and its impact on the Indonesian economy in 1963-1966. Then on stage interpretation (interpretation), inferred and interpreted the facts obtained to be interpreted in accordance with the topics to be discussed. The final stage is historiography, researchers attempted to assemble the facts of history that have been classified chronologically into a scientific work of scholarship that can be justified in accordance with the provisions of historical research methods.

The results of this study are as follows, the problem with Malaysian PM begins gagasan Malaya Tunku Abdul Rachman who want to form the Federation of Malaysia. Indonesia has brought a cold war atmosphere of discourse, which divides the world into two blocks between West Block and the East Block. Indonesia pioneered the non-aligned movement and the anti-colonialism of the new formation. President Sukarno, who runs the political anti Necolim already assume that Malaysia is a form of action in shaping Necolim England, and the establishment of the Malaysian federation considered threatened by President Sukarno of Indonesia.

This confrontation with the policy of making an impact on the Indonesian economy, the economic policy of the government that all the emphasis on political thinking and ignoring the rules of the prevailing economic conditions that also affect the Indonesian economy Indonesian confrontation with Malaysia, in terms of the economic problems faced by Indonesia resulted in the policy of economic-policy of the government is often experienced by mistake, for example, efforts to stem the circulation of money dikeluarkan policy of the bill value Rp.500,-and Rp.1000, - lowered their each to Rp.50, - and Rp 100, -. But as a result, the price of the goods in new dollars to the price in dollars thousandth time, thus resulting in an increase in government spending which impacted experiencing worsening economic situation in Indonesia.

Key words: confrontation, Malaysia, economy

PENDAHULUAN

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Pada antara tahun-tahun ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963-1966. Pengeluaran pemerintah untuk masalah tersebut merupakan pengeluaran yang bersifat non pembangunan yang sifatnya tidak langsung menambah produksi. Pengeluaran pemerintah ini jumlahnya sangat besar dibandingkan pengeluaran pemerintah lainnya, seperti biaya keamanan dalam negeri, subsidi kepada perusahaan swasta dan negara.

Kebijakan politik pemerintahan Indonesia yang bersifat konfrontatif tidak lepas dari keadaan politik internasional saat itu, yang membagi dunia atas dua kekuatan yaitu blok barat dan blok timur. Sehingga pemerintah Indonesia yang dibawah pimpinan Presiden Soekarno telah terbawa oleh suasana perang dingin di dunia waktu itu yakni persaingan antara Blok Barat (*Liberal Kapitalistik*) dan Blok Timur (*Sosial Komunistik*). Sebenarnya di dalam kedua persaingan tersebut Indonesia masuk gerakan Non Blok tetapi anti *nekolim*, pemerintah Indonesia menjalankan politik konfrontasi sebagai bentuk untuk melawan *nekolim* yang sudah dianggap oleh Presiden Soekarno telah mengancam wilayah Indonesia

Sikap politik konfrontatif yang ditunjukkan oleh Presiden Soekarno itu dapat kita lihat dalam berbagai pidato yang disampaikannya, Presiden Soekarno selalu menyatakan bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kekuatan-kekuatan *neokolonialisme, kolonialisme*

dan *imperialisme*. Diantaranya Malaysia yang merupakan produk *neokolonialisme* yang dijadikan pangkalan militer *imperialisme* untuk mengepung Indonesia¹. Adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ini berawal dari ide untuk menggabungkan daerah-daerah suku melayu yang meliputi Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah yang akan diberikan nama Federasi Malaysia. Ide ini pertama kali dilontarkan oleh PM Malaya Tengku Abdulrachman pada tanggal pada tanggal 27 Mei 1961.

Dalam keterangannya, PM Malaya Tengku Abdulrachman mengemukakan Malaya sebagai bangsa sekarang ini tidak akan bisa berdiri sendiri, cepat atau lambat Malaya harus ada saling pengertian dengan Inggris dan rakyat-rakyat Singapura, Borneo utara, Brunei dan Sabah². Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 1963 PM Tengku Abdulracman terbang ke London setelah mendapat laporan dari utusannya yaitu seorang wakil PM Tun Abdulrazak. Persetujuan federasi Malaysia ini baru bisa ditanda tangani oleh wakil-wakil dari Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah pada tanggal 9 juli 1963.

Peristiwa itu mendapat tentangan dari pemerintahan Indonesia, menurut pemerintah Indonesia proyek pembentukan Federasi Malaysia merupakan bagian dari *neokolonialisme*. Hal ini sangat ditentang

¹ Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*. Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1965, hlm. 409

² Kusumah Hadiningrat. *SejarahOperasi-Operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora*. DEPHANKAM PUSJARAH, 1971, hal.3.

oleh Indonesia (sesuai dengan sumpahnya) , bahwa Indonesia telah bersumpah menentang *kolonialisme* dan *imperialisme* dalam segala bentuknya³.

Tentunya hal itu sejalan dengan semangat-semangat anti *kolonialisme* dan *imperialismenya* yang tertuang dalam taks pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Selain itu dalam teks pembukaan UUD 1945 juga di sebutkan untuk ketertiban dunia segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan. Hal inilah yang makin menuntun pemerintah Indonesia untuk tidak menyetujui pembentukan negara federasi Malaysia.

Dihadapan wartawan Asia-Afrika presiden Soekarno mengatakan perjuangan rakyat Serawak, Brunei, dan Sabah adalah bagian dari negara-negara yang baru muncul (*the new emerging forces*) yang membenci penghisapan manusia oleh manusia⁴. Pernyataan - pernyataan pemerintah melalui presiden Soekarno yang sangat berani dan lantang di hadapan dunia internasional ini menunjukkan bahwa betapa ketidak inginnya pemerintah Indonesia dalam ide pembentukan negara federasi ini yang nantinya merupakan bentuk penjajahan baru di negeri Malaya tersebut. Sangatlah tidak bisa ditolerir oleh pemerintahan Indonesia pembentukan negara yang semacam itu karena sebagai negara yang merdeka, pemerintah Indonesia menganggap bahwa pembentukan federasi itu hanyalah akan menjadikan negara boneka dikawasan daerah-daerah suku Melayu, yang tentunya hal itu sangat tidak bisa diterima di Indonesia pada masa-masa *revolusi* waktu itu

METODE PENELITIAN

Suatu penulisan sejarah pasti terdapat metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah, tahap-tahap penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik (mencari dan menemukan sumber yang diperlukan), tahap kritik (pengujian terhadap sumber), tahap interpretasi (penafsiran data), dan tahap historiografi (penulisan sejarah)⁵

Tahap heuristik dilakukan untuk menelusuri sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Peneliti mencari dan mengumpulkan sumber dan data yang relevan. Selain itu peneliti mencoba menginventarisasi sumber-sumber dari beberapa sumber tertulis dan buku yang memberikan informasi seputar obyek yang akan dikaji seperti arsip nasional (pidato Presiden Soekarno, pembukaan ganefo di Jakarta tanggal 27 April 1963), *arsip nasional* (pidato penutupan ganefo di Jakarta tanggal 22 November 1963), *Lembaran Negara Republik Indonesia* No.30 , No.32 tahun 1966, No.89 tahun 1959, No. 238 tahun 1961, *Surat Komando*

³ DEPPEN RI. *Gloria Konfrontasi Mengganyang Malaysia*. Jakarta: 1964, hal. 14

⁴ Ganis Harsono. *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta, 1989 , hal.160

⁵ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*. (Surabaya: Unesa University Press, 2008), hlm 10-11

Aksi Sukarelawan 3 Mei 1964, *Majalah Sketsmasa* No. 14, No. 15, No.21. Th. VI, 1963, No. 24 .Th. VII, 1964, No.9.Th.VII,1965, No. 9, No. 13.Th. VIII, 1965.

Tahap kritik yaitu melakukan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh sebelumnya dengan cara membandingkan sumber-sumber. Seperti membandingkan sumber-sumber yang telah diperoleh baik itu koran, majalah atau buku tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tahun 1963-1966.

Tahap Interpretasi (penafsiran), pada tahap ini akan disimpulkan dan ditafsirkan fakta-fakta yang diperoleh untuk diinterpretasikan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Tahapan terakhir adalah historiografi yang merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Didalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai fakta sejarah yang sudah diklasifikasikan secara kronologis menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya sesuai dengan ketentuan metode penelitian sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin tidak akan lepas dari pemikiran-pemikiran Presiden Soekarno, pemikiran yang tidak bisa dilepaskan tentang sikap Presiden Soekarno yang anti *neokolonialisme*, *kolonialisme* dan *imperialisme*. Penentangan-penentangan terhadap kekuatan *nekolim* tersebut sangatlah kuat ditunjukkan oleh pemerintahan Indonesia melalui Presiden Soekarno. Presiden Soekarno adalah salah satu tokoh nasional besar yang ikut merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Tentunya pengaruh pemikiran Presiden Soekarno sangat besar juga dalam usahanya untuk melawan kekuatan-kekuatan *neokolonialisme*, *kolonialisme* dan *imperialisme*. Kekuatan-kekuatan *neokolonialisme*, *kolonialisme* dan *imperialisme* ini dirasa telah muncul dan mengancam wilayah bangsa Indonesia dengan adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia ini dipandang Presiden Soekarno adalah sebagai bentuk penjajahan negara-negara barat dalam bentuk penjajahan yang baru.

Dalam konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, sikap anti *kolonialisme* dan *imperialisme* yang ditunjukkan pemerintah Indonesia itu disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor adalah sikap politik yang anti *nekolim* yang ditunjukkan Presiden Soekarno, dalam sikap yang anti *nekolim* tersebut Presiden Soekarno memberikan atau menciptakan konsep baru dalam bidang politik, konsep yang tidak lagi membagi dunia ini menjadi tiga golongan tapi menjadi dua golongan. Konsep itu ialah *The New Emerging Forces (Nefo)* dan *The Old Established Forces (Oldefo)*.

Dalam hal masalah konfrontasi dengan Malaysia , Subandrio (Wakil Menteri Pertama II/ Luar Negeri Republik Indonesia) ia berunding dengan Marsekal Chen Yi (Wakil Perdana Menteri Dewan Negara/Menteri Luar Negeri) , dan hasil dari perundingan tersebut adalah RRC menyanggupi untuk

membantu penuh perjuangan Indonesia melawan Malaysia. Pada saat Subandrio membicarakan kemungkinan Inggris menyerang Indonesia, dalam pembicaraan tersebut pada tanggal 25 Januari 1965

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ini telah sampai mengantarkan Indonesia mundur sebagai anggota PBB. Tindakan ini dilakukan oleh Indonesia melalui Presiden Soekarno sehubungan dengan kelanjutan tentang persengketaan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia sangat keberatan akan usaha-usaha yang dilakukan Malaysia yang masuk kedalam anggota PBB, apalagi waktu itu Malaysia berusaha untuk masuk menjadi anggota dewan keamanan tidak tetap PBB.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung berpihak kepada blok timur. Kedekatan Indonesia dengan Cina dan Rusia menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara blok barat. Kemudian, dengan alasan semangat revolusi dan berdikari, pada tanggal 17 Agustus 1965, pemerintah memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan IMF, Bank Dunia, dan PBB. Dengan penarikan diri tersebut, utang kepada IMF sejumlah US\$ 61,9 juta menjadi US\$ 63,5 juta. Jumlah tersebut, termasuk bunga utang yang akan dilunasi dalam 10 kali angsuran per 6 bulan, terhitung sejak tanggal 17 Februari 1966⁶.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, terlebih lagi pada waktu itu Presiden Soekarno telah mengambil kebijakan politik yang bersifat konfrontatif sebagai wujud dari sikapnya yang anti *nekolim*. Pada tahun 1963-1966 Indonesia dihadapkan pada masalah yang disebabkan oleh adanya pembentukan negara Federasi Malaysia, hal tersebut sebagai akibat dari sikap politik konfrontatif yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Pengeluaran pemerintah untuk masalah tersebut merupakan pengeluaran yang bersifat non pembangunan yang sifatnya tidak langsung menambah produksi sehingga mengakibatkan pemerintah Indonesia mengalami defisit

Sebenarnya pada tahun 1959 tercipta surplus transaksi sebesar US\$ 25 juta, tetapi mengalami defisit sebesar US\$ 248 juta dalam 1965. Defisit transaksi berjalan terus menerus dan lama sehingga berdampak buruk atas perkembangan kurs rupiah (yang terus merosot) dan cadangan devisa terus menurun, dalam tahun 1960 cadangan devisa berjumlah US\$ 313 juta, menurun menjadi US\$ 17 juta dalam tahun 1967⁷.

Defisit anggaran belanja pemerintah disebabkan karena pengeluaran-pengeluaran pemerintah tak bisa ditutup dengan penerimaan-penerimaan yang diperoleh pemerintah, atau bisa dikatakan pengeluaran pemerintah lebih besar dibanding dengan penerimaan negara.

Di Indonesia pengeluaran-pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua golongan besar yakni

⁶ Bank Indonesia, *SEJARAH BANK INDONESIA : MONETER, Periode 1959-1966*, hal. 4

⁷ Sofyan Saleh, dkk *Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Waktu*. Jakarta. 2000, hlm. 20

pengeluaran untuk pembangunan dan pengeluaran yang bersifat routine yang sifatnya sulit untuk dikurangi⁸. Hal tersebut mendorong terjadinya inflasi yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat besar bersumber dari pengeluaran yang bersifat non pembangunan atau pengeluaran yang tidak menambah jumlah produksi secara langsung.

Ketika pada awal tahun 1963 Indonesia mengatasi permasalahan ekonomi, dengan diterapkannya Deklarasi Ekonomi (Dekon) dalam mengatasi keterpurukan tersebut. Dekon mengatur segala kebijakan-kebijakan ekonomi baik ekspor maupun impor. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.30 tahun 1963 yang mengatur tentang ekspor⁹. Untuk memperbesar ekspor dan menekan impor telah diadakan berbagai tindakan moneter salah satunya adalah dengan Dekon, akan tetapi tindakan-tindakan ini tidak dapat menekan dalam hubungan pembayaran dengan luar negeri.

Namun penerimaan negara yang utama bersumber pada ekspor. Namun hasil ekspor, bisa dibalans tidak bisa mengatasi masalah defisit yang sedang dihadapi pada saat itu. Hal ini dikarenakan selisih dari impor tidak begitu besar, sehingga bahkan menjadi pemicu defisit anggaran negara. Hal ini mengakibatkan pemasukkan barang-barang impor termasuk bahan-bahan esensial seperti beras, pupuk, benang tenun dan spare-parts terpaksa dibatasi sehingga alat-alat produksi dalam negeri bekerja jauh dibawah kapasitas normal.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini pemerintahan ini selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak, juga disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu yang sangat banyak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang banyak. Inflasi yang hebat sebenarnya tidak akan terjadi jika sejak dahulu pemerintah memberi perhatian yang cukup pada kehidupan ekonomi rakyat banyak, misalnya dengan menjaga keseimbangan anggaran belanja dan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap keuangan negara, serta menitik beratkan pada segi pendapatan dari pada pengeluaran.

Defisit yang terus menerus dan makin besar itu mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar. Pada tanggal 13 Desember 1965, melalui penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 dilakukan tindakan moneter berupa penurunan nilai mata uang dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,-. Untuk itu Bank Negara Indonesia Unit I menerbitkan uang kertas baru, seri Presiden Soekarno dan seri Dwikora. Pembesaran defisit anggaran belanja disebabkan juga oleh penyelenggaraan *Asian Games* di Jakarta dan penyelenggaraan *Games of the New Emerging Force*¹⁰. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun Gelora Bung Karno sebagai tempat penyelenggaraan *Asian Games* tersebut.

Namun sayangnya Presiden Soekarno rupanya kurang tanggap terhadap situasi tersebut, Presiden Soekarno masih ingin melaksanakan keyakinannya tentang lambang dan

⁸ Hadi Susastro, dkk. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*. Jilid II 1959-1966. Jogjakarta. 2005, hal. 193

⁹ Lembaran negara No.30 tahun 1963

¹⁰ Kaslan A Tohir. *Pengantar Ekonomi Tentang Uang-Kredit-Bank*, Jakarta : Gunung Agung, 1970. hal 259

simbol politik tersebut, yang diyakini membawa kebesaran suatu negara tanpa melakukan kalkulasi terhadap keuangan negara dan kondisi ekonomi yang berkembang.

Bersamaan dengan sikap politik yang bersifat konfrontatif, berbagai masalah yang di hadapi semakin datang kepada pemerintahan Indonesia, yaitu permasalahan pertahanan yang sedang dihadapi, salah satunya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Dari permasalahan dengan Malaysia ini sedikit banyak telah berdampak juga pada permasalahan ekonomi di Indonesia. Selain itu juga Indonesia dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks dalam tahun 1963-1965. Masalah – masalah pokok tersebut adalah : pertama meningkatnya inflasi yang berakibat naiknya harga pangan, terutama beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, kedua impor beras juga semakin meningkat yang mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa untuk pembangunan¹¹.

Dalam menjalankan sikap anti nekolimnya dan politik yang bersikap konfrontatif, Presiden Soekarno tidak bisa untuk merubah pemikirannya tentang permasalahan Malaysia. Presiden Soekarno beranggapan bahwa Malaysia ini adalah bentuk dari nekolim yang seharusnya tidak ada, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan dana yang cukup besar karena permasalahan dengan Malaysia ini. Tanpa menghiraukan keadaan ekonomi yang semakin mengalami kelesuan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak dana yang tiap tahunnya saja pemerintah selalu mengeluarkan biaya yang terus meningkat

Sebenarnya kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1965 sering memicu terjadinya inflasi, karena ketidak seimbanya antara jumlah uang dengan defisa. Hal itu disebabkan oleh pengeluaran yang sangat besar, sehingga mengalami inflasi yang naik 650% pada tahun 1965. Dan hal itu bisa terjadi tidak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia yang bersikap konfrontatif

Selain semua tindakan – tindakan moneter yang tidak mencapai sasarannya, pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam pengeluarannya-pengeluarannya. Untuk membangun sebuah simbol kebangsaan yang dianggap perlu untuk diwujudkan dan juga sikap konfrontatifnya terhadap pembentukan negara federasi Malaysia. Pemerintah terpaksa harus mengadakan pengeluaran –pengeluaran yang tiap tahun semakin besar

Bersamaan dengan sikap yang anti nekolim dan pelaksanaan politik yang bersikap konfrontatif. Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang cukup banyak dan berat. Penyelesaian masalah ekonomi ini seakan tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah karena pada waktu itu Presiden Soekarno sebagai kepala pemerintahan terlalu fokus kepada sikap anti nekolimnya, terlebih lagi mengenai permasalahan tentang pembentukan negara federasi Malaysia, dan seakan-akan pemerintah selalu mengalami kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang ada.

Dalam pengeluaran pemerintah untuk subsidi perusahaan swasta dan perusahaan negara saja, pemerintah memang tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan besarnya pengeluaran pemerintah untuk biaya keamanan baik biaya untuk pembebasan Irian Barat maupun aksi ganyang Malaysia oleh pemerintah Indonesia. Namun pada tahun 1963 besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi perusahaan baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah sebesar 13.9 milyar rupiah dan pada tahun 1964 mengalami kenaikan lagi menjadi 15.6 milyar rupiah

Presiden Soekarno beranggapan bahwa pembentukan tersebut telah menentang ide-ide baru manusia, menentang perdamaian dunia, meningkatkan dominasi, *eksploitasi*, *imperialisme* dan *kolonialisme* dalam bentuk baru. Ujung dari penolakan ini mengantarkan pemerintah Indonesia dalam situasi politik yang konfrontatif. Salah satu tindakan pemerintah Indonesia yang nyata dalam penolakan ini adalah pengumuman “Ganyang Malaysia” oleh Presiden Soekarno

Konfrontasi ini berdampak terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah, yang mengabaikan kaidah-kaidah ekonomi. hal ini mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukan, defisit anggaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan terjadinya infansi yang tinggi. Selain itu bahan pokok juga mengalami kenaikan terutama beras

SIMPULAN

Pada periode tahun 1950an sampai periode tahun 1960an, Indonesia telah dihadapkan dengan berbagai masalah yang berat untuk dihadapi. Salah satu permasalahan tersebut ialah permasalahan ekonomi, kita mengetahui bahwa pada waktu tahun-tahun 1950an dan tahun-tahun 1960an Indonesia memang sedang mengalami keterpurukan ekonomi yang sangat parah. Selain itu politik yang konfrontatif telah ditunjukkan oleh Presiden Soekarno, sebagai akibatnya permasalahan dengan negara tetangga sedikit banyak juga ikut memberi pengaruh terhadap penanganan permasalahan ekonomi, salah satunya pada tahun 1963-1966 yaitu adanya konfrontasi dengan Malaysia.

Permasalahan dengan Malaysia ini merupakan permasalahan yang memberi pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hanya berjarak satu tahun setelah kasus pembebasan Irian Barat yang juga menghabiskan banyak dana dalam pembiayaannya. Dalam segi pembiayaan kedua permasalahan tersebut, merupakan masalah pendanaan yang lebih banyak dari pada masalah pembiayaan lainnya yaitu dalam operasi keamanan dalam negeri dan subsidi kepada perusahaan swasta dan negara. Dalam kegiatan ekonomi permasalahan dengan Malaysia ini telah mengakibatkan Indonesia mengalami defisit.

Pengaruh konfrontasi ini sangat terasa dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi Indonesia, setidaknya

¹¹ Suroso. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, 1997, hlm.92

dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 1963-1966. Dalam berbagai hal, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ini, pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Soekarno telah mengabaikan aspek-aspek dari ekonomi yang sewajarnya, sebagai dampaknya berbagai kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah saat itu banyak yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ekonomi yang berlangsung. Semua kebijakan moneter yang dilaksanakan untuk tujuan mensejahterakan rakyat dalam kenyataannya tidak mampu berjalan dengan baik dan tidak sedikit juga mengalami kegagalan

Selain itu sikap Presiden Soekarno yang anti *kolonialisme* dan *imperialisme* telah membawa Indonesia semakin terisolasi dalam kancah hubungan internasional. Sikap yang anti *kolonialisme* dan *imperialisme* ini nyatanya telah membawa Indonesia dalam pertikaian regional di Asia Tenggara yaitu memprotes adanya pembentukan Federasi Malaysia, yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaannya dari PBB. Akibat dari pertikaian antara Indonesia dan Malaysia ini juga mengantarkan Indonesia masuk kedalam rancangan politik atau pengaruh Cina. Hal ini dapat dilihat dengan keinginan pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno mencoba untuk membangun politik poros yaitu Jakarta-Peking

Konsep politik Soekarno yaitu Nefo dan Oldofo sebagai sikap anti *kolonialisme* dan *imperialisme* membawa Indonesia untuk membangun lambang-lambang kebangsaan. Selain itu juga konsep politik ini juga awal dari terciptanya *ganefo* dan *conefo* yang nantinya juga menelan biaya banyak untuk pengadaannya.

Tanpa menghiraukan keadaan ekonomi dan banyaknya permasalahan ekonomi yang semakin terpuruk, pemerintah Indonesia yakni melalui Presiden Soekarno masih tetap melaksanakan *idealisme*. Sikap yang anti *kolonialisme* dan *imperialisme*, sehingga tidak ingin kekuasaan penjajahan mulai berkuasa lagi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sangat menolak dengan adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia dan siap melakukan apapun untuk penolakan tersebut termasuk mengeluarkan dana yang sangat banyak untuk melakukan konfrontasi fisik langsung dengan pihak Malaysia. Tindakan penolakan tersebut sampai berujung dengan keluarnya Indonesia dari badan keanggotaan PBB, yang mengakibatkan Indonesia semakin terisolasinya Indonesia dari hubungan internasional, dan berkeinginan mengadakan *ganefo* dan *conefo* di Jakarta tanpa memperdulikan bahwa perekonomian didalam negeri sedang mengalami keterpurukan

SARAN

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Supaya siswa lebih mengetahui dinamika ekonomi dan penyebabnya dalam kehidupan sebagai bangsa dan di dalam kehidupan internasional, serta dapat menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa

Penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar, dalam pelajaran sejarah penelitian ini dapat digunakan dalam KI dan KD yaitu di dalam KI dapat dimasukkan pada mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan, kemudian KD melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Arsip nasional , pidato Presiden Soekarno pembukaan ganefo di Jakarta
 _____ Pidato penutupan ganefo di Jakarta
 Lembaran Negara Republik Indonesia No.30
 _____ No.32 tahun 1966
 _____ No.89 tahun 1959
 _____ No. 238 tahun 1961
 Surat Komando Aksi Sukarelawan

B. Terbitan sejaman

Majalah

- Sketsmasa No. 14, No.15, No.21. Th. VI, 1963
 _____ No. 24 .Th. VII, 1964
 _____ No.9.Th.VII,1965
 _____ No. 9, No.13.Th. VIII, 1965

C. Buku

- Adam, Cindy, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta (1965)
 Booth, Anne, dkk, *Ekonomi Orba*, Jakarta : LP3ES (1990)
 Budi Santoso Suryo Sumarto , *Ekonomi Pancasila . Untuk Mendukung Tinggal Landas & Pemangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jakarta : Lembaga Pertahanan Nasional (1989)
 DEPPEN RI, *Gloria Konfrontasi Mengganyang Malaysia*, Jakarta : DEPPEN RI ,(1964)
 Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta : CV Haji Masagung, (1989)
 Hadi Susastro, dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir. Jilid II 1959-1966*, Jogjakarta : Kanisius, (2005)
 Kaslan A Tohir, *Pengantar Ekonomi Tentang Uang-Kredit-Bank*, Jakarta : Gunung Agung (1970)
 LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah*. Jakarta : LP3ES, (1995)
 Marwati Djoened, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia, jilid VI. Edisi Pemutakhiran*, Jakarta : Balai Pustaka (2010)
 Ricklefs , MC, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi, (2007)

Sofyan Saleh, dkk , *Perekonomian Indonesia Dalam Prespektif Waktu*, Jakarta : Pamator, (2000)
Suroso. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, (1997)

Tambunan, TH Tulus, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta : Ghalia Indonesia, (2003)
Zulkarnain Djamin, *Perekonomian Indonesia. Edisi II*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, (1993)

